

**ANALISIS YURIDIS UPAYA KEBERATAN BAGI PENGGUNA JASA  
CUKAI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 136/PMK.04/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2017 TENTANG  
KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI**

Faisal Ansari Siregar \*  
Prof. Dr. Mustamam, M.Ag \*\*  
Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.Hum \*\*

**ABSTRAK**

Penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat bea dan cukai dalam bidang cukai terkadang terjadi perbedaan atau ketidakpuasan bagi pengguna jasa cukai. Maka upaya hukum yang dapat dilakukan salah satunya adalah mengajukan keberatan. Permasalahan yang dibahas tentang pengaturan hukum upaya keberatan bagi pengguna jasa cukai, peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap upaya keberatan yang dilakukan oleh pengguna jasa cukai, dan akibat dan upaya atas keputusan keberatan bidang cukai.

Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Pengaturan keberatan bidang cukai diatur pada Pasal 41 Ayat (2) UU Cukai, lebih khusus diatur dalam PMK No. 136 /PMK.04/2022 jo PMK No.51/PMK.04/2017. Peran DJBC terhadap upaya keberatan yang dilakukan oleh pengguna jasa cukai antara lain menyusun rumusan dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang cukai yang kewenangan penanganan keberatannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai peraturan perundang-undangan. Akibat hukum keberatan bidang cukai dengan bentuk putusan keberatan, yaitu mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menetapkan lain. Upaya yang dapat dilakukan apabila pengguna jasa cukai masih tidak puas dapat melakukan upaya hukum banding atas penetapan keberatan.

**Kata Kunci: Analisis Yuridis, Keberatan, Cukai**

---

\* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

\*\* Dosen Pembimbing

**LEGAL ANALYSIS OF OBJECTIONS FOR USERS OF EXCISE SERVICES  
BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 136/PMK.04/2022 CONCERNING  
AMENDMENTS TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE  
NUMBER 51/PMK.04/2017 CONCERNING OBJECTIONS IN THE FIELD OF  
CUSTOMS AND EXCISE**

Faisal Ansari Siregar \*  
Prof. Dr. Mustamam, M.Ag \*\*  
Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.Hum \*\*

**ABSTRACT**

*The determination issued by customs and excise officials in the field of excise sometimes causes differences or dissatisfaction for users of excise services. So one of the legal efforts that can be taken is to file an objection. The problems discussed are the legal regulations for objection efforts for users of excise services, the role of the Directorate General of Customs and Excise regarding objection efforts made by users of excise services, and the consequences and efforts for objection decisions in the excise sector.*

*The research method used is descriptive analytical, the type of research used is normative juridical, the data collection tool uses Library Research. Data analysis uses qualitative methods that produce descriptive-analytical data.*

*The regulation of objections in the field of excise is regulated in Article 41 Paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise, more specifically regulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 136 / PMK.04 / 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Finance Number 51 / PMK.04 / 2017 concerning Objections in the Field of Customs and Excise. The role of DJBC in objection efforts made by excise service users includes formulating and implementing research on objections to excise determinations whose authority to handle objections is given to the Directorate General of Customs and Excise in accordance with laws and regulations. The legal consequences of excise objections in the form of objection decisions, namely granting all or part, rejecting, or determining otherwise. Efforts that can be made if excise service users are still dissatisfied can make legal appeals against the objection determination.*

**Keywords: Legal Analysis, Objection, Excise**

---

\* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

\*\* Dosen Pembimbing